



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); .
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
22. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 148);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 89);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 91);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati adalah Bupati Luwu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang dibentuk oleh Bupati.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
14. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
15. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
16. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
21. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
23. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

24. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
25. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
26. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
27. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
28. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
29. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepentingan orang atau Badan.
30. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya di singkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.499.998.049.538,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp168.403.407.970,- (sertaus enam puluh delapan miliar empat ratus tiga juta rupiah empat ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), sehingga menjadi Rp1.668.401.457.508,- (satu triliun enam ratus enam puluh delapan miliar empat ratus satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. pendapatan daerah	
1. semula	Rp1.472.270.281.391,00
2. berkurang/(bertambah)	<u>Rp 135.924.513.706,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp1.608.194.795.101,00
b. belanja daerah	
1. semula	Rp1.499.998.049.538,00
2. berkurang/(bertambah)	<u>Rp 168.403.407.970,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp1.668.401.457.508,00
c. pembiayaan daerah	
1. penerimaan pembiayaan	
a) semula	Rp27.727.768.143,00
b) berkurang/(bertambah)	<u>Rp32.478.894.264,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp60.206.662.407,00

2. pengeluaran pembiayaan	
a) semula	Rp0,00
b) berkurang/(bertambah)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp0,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp60.206.662.407,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 24 Oktober 2023

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 24 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NOMOR83

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	146.849.671.320	207.494.104.220	60.644.432.900	41 %
4.1.01	Pajak Daerah	33.336.750.000	48.927.365.984	15.590.615.984	47 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	110.250.000	260.916.355	150.666.355	137 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	110.250.000	260.916.355	150.666.355	137 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	110.250.000	260.916.355	150.666.355	137 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.100.000.000	1.734.874.312	(365.125.688)	17 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.100.000.000	1.734.874.312	(365.125.688)	17 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.100.000.000	1.734.874.312	(365.125.688)	17 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	21.000.000	15.300.732	(5.699.268)	27 %
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	21.000.000	15.300.732	(5.699.268)	27 %
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	21.000.000	15.300.732	(5.699.268)	27 %
4.1.01.09	Pajak Reklame	525.000.000	630.946.908	105.946.908	20 %
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	525.000.000	630.946.908	105.946.908	20 %
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	525.000.000	630.946.908	105.946.908	20 %
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	12.453.000.000	13.560.983.890	1.107.983.890	9 %
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	12.453.000.000	13.560.983.890	1.107.983.890	9 %
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	12.453.000.000	13.560.983.890	1.107.983.890	9 %
4.1.01.11	Pajak Parkir	0	200.000.000	200.000.000	100 %
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	0	200.000.000	200.000.000	100 %
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	0	200.000.000	200.000.000	100 %
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	15.750.000	22.000.000	6.250.000	40 %
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	15.750.000	22.000.000	6.250.000	40 %
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	15.750.000	22.000.000	6.250.000	40 %
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	36.750.000	36.750.000	0	0 %
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	36.750.000	36.750.000	0	0 %
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	36.750.000	36.750.000	0	0 %

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.675.000.000	4.965.593.787	1.290.593.787	35 %
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	3.675.000.000	4.965.593.787	1.290.593.787	35 %
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	3.675.000.000	4.965.593.787	1.290.593.787	35 %
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.200.000.000	10.000.000.000	800.000.000	9 %
4.1.01.15.01	PBBP2	9.200.000.000	10.000.000.000	800.000.000	9 %
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	9.200.000.000	10.000.000.000	800.000.000	9 %
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.200.000.000	17.500.000.000	12.300.000.000	237 %
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	5.100.000.000	17.400.000.000	12.300.000.000	241 %
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	5.100.000.000	17.400.000.000	12.300.000.000	241 %
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	11.612.900.000	12.288.835.000	675.935.000	6 %
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	6.861.700.000	6.861.700.000	0	0 %
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.900.000.000	3.900.000.000	0	0 %
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	3.900.000.000	3.900.000.000	0	0 %
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	200.000.000	200.000.000	0	0 %
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	200.000.000	200.000.000	0	0 %
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300.000.000	300.000.000	0	0 %
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300.000.000	300.000.000	0	0 %
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	2.296.900.000	2.296.900.000	0	0 %
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	2.296.900.000	2.296.900.000	0	0 %
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	30.900.000	30.900.000	0	0 %
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	30.900.000	30.900.000	0	0 %
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	133.900.000	133.900.000	0	0 %
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	133.900.000	133.900.000	0	0 %
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.241.200.000	3.917.135.000	675.935.000	21 %
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.001.200.000	2.677.135.000	675.935.000	34 %
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	0	187.500.000	187.500.000	100 %

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	154.500.000	154.500.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	92.700.000	92.700.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1.754.000.000	2.242.435.000	488.435.000	28 %
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	30.000.000	30.000.000	0	0 %
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	30.000.000	30.000.000	0	0 %
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000	5.000.000	0	0 %
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000	5.000.000	0	0 %
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	45.000.000	45.000.000	0	0 %
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	45.000.000	45.000.000	0	0 %
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	160.000.000	160.000.000	0	0 %
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	60.000.000	60.000.000	0	0 %
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.510.000.000	1.510.000.000	0	0 %
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	10.000.000	10.000.000	0	0 %
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	10.000.000	10.000.000	0	0 %
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.400.000.000	6.400.000.000	0	0 %
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.400.000.000	6.400.000.000	0	0 %
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.400.000.000	6.400.000.000	0	0 %
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.400.000.000	6.400.000.000	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	95.500.021.320	139.877.903.236	44.377.881.916	46 %
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	25.079.402.055	25.079.402.055	100 %
4.1.04.01.04	Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	25.079.402.055	25.079.402.055	100 %
4.1.04.01.04.0007	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	0	25.079.402.055	25.079.402.055	100 %
4.1.04.05	Jasa Giro	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0 %
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0 %
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0 %
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	500.000.000	500.000.000	0	0 %
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000	500.000.000	0	0 %
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000	500.000.000	0	0 %
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	65.882.860	65.882.860	100 %
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	65.882.860	65.882.860	100 %
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	65.882.860	65.882.860	100 %
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0	487.199	487.199	100 %
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0	380.624	380.624	100 %
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	0	380.624	380.624	100 %
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0	100	100	100 %
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0	100	100	100 %
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0	106.475	106.475	100 %
4.1.04.12.14.0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil	0	106.475	106.475	100 %
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0	114.979.152	114.979.152	100 %
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0	106.017.772	106.017.772	100 %
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0	106.017.772	106.017.772	100 %
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0	8.961.380	8.961.380	100 %
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0	8.961.380	8.961.380	100 %
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	70.000.000.000	85.000.000.000	15.000.000.000	21 %
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	70.000.000.000	85.000.000.000	15.000.000.000	21 %
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	70.000.000.000	85.000.000.000	15.000.000.000	21 %
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	19.500.021.320	23.617.151.970	4.117.130.650	21 %
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.500.021.320	23.617.151.970	4.117.130.650	21 %

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.500.021.320	23.617.151.970	4.117.130.650	21 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.323.346.610.075	1.357.365.065.481	34.018.455.406	3 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.202.223.094.000	1.208.741.549.406	6.518.455.406	1 %
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.017.761.507.000	1.018.202.691.406	441.184.406	0 %
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	11.592.343.000	14.378.197.850	2.785.854.850	24 %
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	911.262.000	911.262.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.396.056.000	7.618.520.000	2.222.464.000	41 %
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0	280.911.000	280.911.000	100 %
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0	282.474.000	282.474.000	100 %
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0	5.850	5.850	100 %
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	1.306.949.000	1.306.949.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0	134.937.900	134.937.900	100 %
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.117.567.000	1.982.629.100	(134.937.900)	6 %
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	16.904.000	16.904.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.843.605.000	1.843.605.000	0	0 %
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	689.593.550.000	689.593.550.000	0	0 %
4.2.01.01.02.0001	DAU	689.593.550.000	689.593.550.000	0	0 %
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	113.027.186.000	113.027.186.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	456.293.000	456.293.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	27.609.630.000	27.609.630.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.342.020.000	6.342.020.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	1.116.276.000	1.116.276.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	478.710.000	478.710.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	6.093.571.000	6.093.571.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	11.067.965.000	11.067.965.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	45.358.276.000	45.358.276.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	13.985.935.000	13.985.935.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	518.510.000	518.510.000	0	0 %

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	203.548.428.000	201.203.757.556	(2.344.670.444)	1 %
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	54.448.560.000	54.409.145.289	(39.414.711)	0 %
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.785.000.000	1.785.000.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	81.186.819.000	81.186.819.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.376.000.000	2.376.000.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	13.010.378.000	13.010.378.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.077.280.000	4.077.280.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.914.200.000	1.914.200.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	13.596.489.000	13.596.489.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	421.592.000	0	(421.592.000)	100 %
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	22.441.019.000	22.441.019.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.313.521.000	4.454.158.347	(1.859.362.653)	29 %
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	490.400.000	490.400.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000	438.800.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	628.000.000	603.698.920	(24.301.080)	4 %
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	420.370.000	420.370.000	0	0 %
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	10.522.189.000	16.599.460.000	6.077.271.000	58 %
4.2.01.02.01	DID	10.522.189.000	16.599.460.000	6.077.271.000	58 %
4.2.01.02.01.0001	DID	10.522.189.000	16.599.460.000	6.077.271.000	58 %
4.2.01.05	Dana Desa	173.939.398.000	173.939.398.000	0	0 %
4.2.01.05.01	Dana Desa	173.939.398.000	173.939.398.000	0	0 %
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	173.939.398.000	173.939.398.000	0	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	121.123.516.075	148.623.516.075	27.500.000.000	23 %
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	110.921.716.075	110.921.716.075	0	0 %
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	110.921.716.075	110.921.716.075	0	0 %
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	29.975.000.000	29.975.000.000	0	0 %
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	28.389.700.000	28.389.700.000	0	0 %
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.407.016.075	32.407.016.075	0	0 %

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	150.000.000	150.000.000	0	0 %
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0 %
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	10.201.800.000	37.701.800.000	27.500.000.000	270 %
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	10.201.800.000	37.701.800.000	27.500.000.000	270 %
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	10.201.800.000	37.701.800.000	27.500.000.000	270 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.074.000.000	43.335.625.400	41.261.625.400	1.989 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.074.000.000	43.335.625.400	41.261.625.400	1.989 %
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.074.000.000	3.678.063.400	1.604.063.400	77 %
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.074.000.000	3.678.063.400	1.604.063.400	77 %
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.074.000.000	3.678.063.400	1.604.063.400	77 %
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0	39.657.562.000	39.657.562.000	100 %
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	0	39.657.562.000	39.657.562.000	100 %
4.3.01.04.03.0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	0	39.657.562.000	39.657.562.000	100 %
	Jumlah Pendapatan	1.472.270.281.395	1.608.194.795.101	135.924.513.706	9 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.011.443.186.661	1.061.258.849.256	49.815.662.595	5 %
5.1.01	Belanja Pegawai	604.323.502.511	595.650.376.212	(8.673.126.299)	1 %
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	415.982.390.013	405.047.230.073	(10.935.159.940)	3 %
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	310.601.896.613	303.018.502.828	(7.583.393.785)	2 %
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	285.849.420.613	277.043.353.428	(8.806.067.185)	3 %
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	24.752.476.000	25.975.149.400	1.222.673.400	5 %
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	29.775.012.000	29.163.917.668	(611.094.332)	2 %
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	27.513.788.000	26.770.636.942	(743.151.058)	3 %
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.261.224.000	2.393.280.726	132.056.726	6 %
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.235.754.000	8.138.015.000	902.261.000	12 %
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.235.754.000	8.138.015.000	902.261.000	12 %

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	25.102.307.000	23.042.955.500	(2.059.351.500)	8 %
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	25.102.307.000	23.042.955.500	(2.059.351.500)	8 %
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.982.165.000	2.671.143.000	(311.022.000)	10 %
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.982.165.000	2.671.143.000	(311.022.000)	10 %
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	18.521.680.000	17.972.077.896	(549.602.104)	3 %
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	16.794.472.000	16.177.437.876	(617.034.124)	4 %
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.727.208.000	1.794.640.020	67.432.020	4 %
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	267.976.000	230.495.409	(37.480.591)	14 %
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	267.976.000	230.495.409	(37.480.591)	14 %
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.856.400	4.715.858	(140.542)	3 %
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.022.000	3.881.458	(140.542)	3 %
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	834.400	834.400	0	0 %
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	18.870.874.000	18.311.387.643	(559.486.357)	3 %
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	17.711.058.000	16.996.732.439	(714.325.561)	4 %
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1.159.816.000	1.314.655.204	154.839.204	13 %
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	659.153.000	623.504.520	(35.648.480)	5 %
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	592.401.000	569.660.605	(22.740.395)	4 %
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	66.752.000	53.843.915	(12.908.085)	19 %
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.960.716.000	1.870.514.751	(90.201.249)	5 %
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.777.148.000	1.708.987.451	(68.160.549)	4 %
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	183.568.000	161.527.300	(22.040.700)	12 %
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	48.689.680.000	45.503.966.956	(3.185.713.044)	7 %
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	48.638.028.351	45.016.300.956	(3.621.727.395)	7 %
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	48.638.028.351	45.016.300.956	(3.621.727.395)	7 %
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0	348.646.000	348.646.000	100 %
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0	348.646.000	348.646.000	100 %
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	51.651.649	139.020.000	87.368.351	169 %
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	51.651.649	139.020.000	87.368.351	169 %

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	125.268.055.578	130.989.882.177	5.721.826.599	5 %
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.332.333.250	1.546.213.121	213.879.871	16 %
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	4.299.750	8.479.782	4.180.032	97 %
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	81.900.000	56.383.415	(25.516.585)	31 %
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	819.000	497.274	(321.726)	39 %
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	20.475.000	20.505.775	30.775	0 %
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	485.667.000	438.750.000	(46.917.000)	10 %
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0	6.500.000	6.500.000	100 %
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	614.250	715.000	100.750	16 %
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.433.250	1.194.375	(238.875)	17 %
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	143.325.000	119.437.500	(23.887.500)	17 %
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	391.000.000	325.000.000	(66.000.000)	17 %
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	202.800.000	568.750.000	365.950.000	180 %
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	430.337.500	430.425.250	87.750	0 %
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	139.912.500	139.912.500	0	0 %
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.800.000	7.800.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15.600.000	15.600.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	96.500.000	96.500.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.500.000	1.500.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	6.500.000	6.500.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	73.225.000	73.312.750	87.750	0 %
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	20.460.000	20.460.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	195.000	195.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.755.000	1.755.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	8.000.000	8.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	58.500.000	58.500.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	390.000	390.000	0	0 %
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	81.186.819.000	76.553.146.000	(4.633.673.000)	6 %

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	81.186.819.000	76.553.146.000	(4.633.673.000)	6 %
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	13.010.378.000	10.874.498.000	(2.135.880.000)	16 %
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	13.010.378.000	10.874.498.000	(2.135.880.000)	16 %
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.376.000.000	1.302.000.000	(1.074.000.000)	45 %
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.376.000.000	1.302.000.000	(1.074.000.000)	45 %
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	17.014.315.428	22.761.784.406	5.747.468.978	34 %
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	17.014.315.428	22.761.784.406	5.747.468.978	34 %
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.254.972.400	9.013.862.400	(241.110.000)	3 %
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.176.732.400	7.263.542.400	86.810.000	1 %
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.424.240.000	1.316.820.000	(107.420.000)	8 %
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	654.000.000	433.500.000	(220.500.000)	34 %
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	662.900.000	664.400.000	1.500.000	0 %
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	145.100.000	153.600.000	8.500.000	6 %
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	517.800.000	510.800.000	(7.000.000)	1 %
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	0	4.633.673.000	4.633.673.000	100 %
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	0	4.633.673.000	4.633.673.000	100 %
5.1.01.03.10	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	0	2.135.880.000	2.135.880.000	100 %
5.1.01.03.10.0001	Belanja TKG PPPK	0	2.135.880.000	2.135.880.000	100 %
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0	1.074.000.000	1.074.000.000	100 %
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	0	1.074.000.000	1.074.000.000	100 %
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.490.673.543	12.185.718.629	(304.954.914)	2 %
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000	668.745.000	(113.295.000)	14 %
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000	668.745.000	(113.295.000)	14 %
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	84.800.800	45.725.400	(39.075.400)	46 %
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	84.800.800	45.725.400	(39.075.400)	46 %
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	86.179.800	69.885.300	(16.294.500)	19 %
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	86.179.800	69.885.300	(16.294.500)	19 %
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000	66.874.500	(157.500)	0 %

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000	66.874.500	(157.500)	0 %
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000	1.131.674.250	(2.283.750)	0 %
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000	1.131.674.250	(2.283.750)	0 %
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	121.495.500	113.274.000	(8.221.500)	7 %
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	121.495.500	113.274.000	(8.221.500)	7 %
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	32.459.700	3.000.000	(29.459.700)	91 %
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	32.459.700	3.000.000	(29.459.700)	91 %
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000	2.639.700.000	(6.300.000)	0 %
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000	2.639.700.000	(6.300.000)	0 %
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000	636.300.000	(25.200.000)	4 %
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000	636.300.000	(25.200.000)	4 %
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	241.200	250.265	9.065	4 %
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	241.200	250.265	9.065	4 %
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	499.996	499.996	0	0 %
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	499.996	499.996	0	0 %
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.240.673.552	2.213.201.118	(27.472.434)	1 %
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	64.121.552	61.981.166	(2.140.386)	3 %
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.609.696	1.604.988	(4.708)	0 %
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.862.304	4.814.964	(47.340)	1 %
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.170.080.000	2.144.800.000	(25.280.000)	1 %
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.567.411.200	4.571.388.800	3.977.600	0 %
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.567.411.200	4.571.388.800	3.977.600	0 %
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	66.381.795	25.200.000	(41.181.795)	62 %
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	66.381.795	25.200.000	(41.181.795)	62 %
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	671.623.377	803.298.377	131.675.000	20 %
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000	54.600.000	0	0 %
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000	54.600.000	0	0 %
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.468.000	6.468.000	0	0 %

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.468.000	6.468.000	0	0 %
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000	92.280.000	(6.000.000)	6 %
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000	92.280.000	(6.000.000)	6 %
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280	6.083.280	0	0 %
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280	6.083.280	0	0 %
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	656.894	656.894	0	0 %
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	656.894	656.894	0	0 %
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	8.400	8.400	0	0 %
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	8.400	8.400	0	0 %
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	20.000.000	20.000.000	0	0 %
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	20.000.000	20.000.000	0	0 %
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	13.203.453	13.203.453	0	0 %
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	13.203.453	13.203.453	0	0 %
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	334.504.250	486.804.250	152.300.000	46 %
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1.212.750	1.212.750	0	0 %
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	23.100.000	23.100.000	0	0 %
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	231.000	231.000	0	0 %
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	5.775.000	5.775.000	0	0 %
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	136.983.000	136.983.000	0	0 %
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	173.250	173.250	0	0 %
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	404.250	404.250	0	0 %
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	40.425.000	40.425.000	0	0 %
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	69.000.000	75.000.000	6.000.000	9 %
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	57.200.000	203.500.000	146.300.000	256 %
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	127.819.100	113.194.100	(14.625.000)	11 %
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	42.900.000	28.275.000	(14.625.000)	34 %

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.200.000	2.200.000	0	0 %
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.300.000	3.300.000	0	0 %
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	25.265.900	25.265.900	0	0 %
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	339.000	339.000	0	0 %
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.551.000	1.551.000	0	0 %
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	22.013.200	22.013.200	0	0 %
5.1.01.05.11.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	330.000	330.000	0	0 %
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	11.000.000	11.000.000	0	0 %
5.1.01.05.11.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	55.000	55.000	0	0 %
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	495.000	495.000	0	0 %
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.760.000	1.760.000	0	0 %
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	16.500.000	16.500.000	0	0 %
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	110.000	110.000	0	0 %
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	661.680.000	560.880.000	(100.800.000)	15 %
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	211.680.000	110.880.000	(100.800.000)	48 %
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	211.680.000	110.880.000	(100.800.000)	48 %
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	450.000.000	450.000.000	0	0 %
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	450.000.000	450.000.000	0	0 %
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	559.400.000	559.400.000	0	0 %
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	559.400.000	559.400.000	0	0 %
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	559.400.000	559.400.000	0	0 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.728.787.951	431.823.768.162	38.094.980.211	10 %
5.1.02.01	Belanja Barang	71.148.570.067	82.801.649.081	11.653.079.014	16 %
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	71.072.238.490	82.720.968.404	11.648.729.914	16 %
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	116.434.218	171.172.731	54.738.513	47 %
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	103.211.000	103.051.000	(160.000)	0 %
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.930.384.152	2.256.725.268	326.341.116	17 %
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	77.276.040	42.271.126	(35.004.914)	45 %

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.950.000	5.950.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0	8.475.000	8.475.000	100 %
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	91.155.000	186.850.500	95.695.500	105 %
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	80.000.000	80.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	764.317.226	4.137.393.620	3.373.076.394	441 %
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.734.999.745	2.574.963.785	839.964.040	48 %
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	279.405.000	279.405.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	250.000	250.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	14.000.000	14.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	600.000	660.000	60.000	10 %
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.354.822.770	1.657.094.726	302.271.956	22 %
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.638.998.188	1.919.125.050	280.126.862	17 %
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.171.435.896	3.863.370.130	691.934.234	22 %
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	139.990.000	139.680.000	(310.000)	0 %
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.185.724.040	1.324.469.440	138.745.400	12 %
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	93.503.250	289.403.850	195.900.600	210 %
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	306.343.265	400.928.915	94.585.650	31 %
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.750.000	16.750.000	14.000.000	509 %
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	11.300.000	11.000.000	(300.000)	3 %
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	40.500.000	97.600.000	57.100.000	141 %
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	65.741.300	118.216.912	52.475.612	80 %
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.263.019.485	4.003.352.611	(1.259.666.874)	24 %
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.410.929.435	4.124.737.708	(1.286.191.727)	24 %
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	23.044.375.000	31.087.344.776	8.042.969.776	35 %
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.664.521.150	3.508.842.702	844.321.552	32 %
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.876.754.530	5.856.631.254	2.979.876.724	104 %
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.445.472.800	10.335.444.800	(3.110.028.000)	23 %
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.559.485.000	1.636.787.500	77.302.500	5 %

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	8.100.000	0	(8.100.000)	100 %
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	125.000.000	0	(125.000.000)	100 %
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	382.200.000	796.300.000	414.100.000	108 %
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	134.200.000	134.200.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	335.000.000	356.500.000	21.500.000	6 %
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	1.100.000	58.100.000	57.000.000	5.182 %
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	66.500.000	66.500.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	83.820.000	156.670.000	72.850.000	87 %
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	88.450.000	135.950.000	47.500.000	54 %
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0	8.800.000	8.800.000	100 %
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0	6.300.000	6.300.000	100 %
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	43.240.000	25.960.000	(17.280.000)	40 %
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.082.850.000	252.750.000	(830.100.000)	77 %
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.096.080.000	318.940.000	(777.140.000)	71 %
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	146.550.000	146.550.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	5.500.000	5.500.000	0	0 %
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	76.331.577	80.680.677	4.349.100	6 %
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	0	1.147.000	1.147.000	100 %
5.1.02.01.02.0007	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	14.983.800	14.983.800	0	0 %
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	60.248.202	60.606.202	358.000	1 %
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	1.099.575	3.943.675	2.844.100	259 %
5.1.02.02	Belanja Jasa	121.026.549.704	119.890.486.961	(1.136.062.743)	1 %
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	62.488.013.554	60.288.603.506	(2.199.410.048)	4 %
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.043.800.000	3.468.750.000	(575.050.000)	14 %
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.641.315.000	1.932.320.000	(708.995.000)	27 %
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	27.000.000	21.600.000	(5.400.000)	20 %
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	613.000.000	594.700.000	(18.300.000)	3 %
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	102.800.000	94.300.000	(8.500.000)	8 %

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	556.200.000	521.350.000	(34.850.000)	6 %
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	15.300.000	15.300.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	614.400.000	630.000.000	15.600.000	3 %
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	33.230.000	33.230.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.284.443.800	1.033.314.000	(2.251.129.800)	69 %
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	137.600.000	159.400.000	21.800.000	16 %
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	820.800.000	1.054.900.000	234.100.000	29 %
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	544.800.000	445.400.000	(99.400.000)	18 %
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.854.600.000	1.664.700.000	(189.900.000)	10 %
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	168.000.000	226.500.000	58.500.000	35 %
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.051.984.000	1.000.184.000	(51.800.000)	5 %
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.831.060.000	6.231.510.000	(599.550.000)	9 %
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.371.600.000	3.219.300.000	(152.300.000)	5 %
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.814.400.000	7.585.550.000	(228.850.000)	3 %
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.835.050.000	1.796.150.000	(38.900.000)	2 %
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.128.400.000	3.052.500.000	(75.900.000)	2 %
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	559.300.000	760.100.000	200.800.000	36 %
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	280.200.000	248.900.000	(31.300.000)	11 %
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.763.400.000	1.633.000.000	(130.400.000)	7 %
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	96.000.000	68.000.000	(28.000.000)	29 %
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	0	409.400.000	409.400.000	100 %
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	65.500.000	35.800.000	(29.700.000)	45 %
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	9.000.000	12.600.000	3.600.000	40 %
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	75.500.000	76.500.000	1.000.000	1 %
5.1.02.02.01.0040	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	121.200.000	103.200.000	(18.000.000)	15 %
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	30.000.000	226.100.000	196.100.000	654 %
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	90.000.000	345.000.000	255.000.000	283 %
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	3.651.600.000	3.484.400.000	(167.200.000)	5 %

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	877.700.000	2.199.727.800	1.322.027.800	151 %
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	2.150.000	2.150.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	337.000.000	445.000.000	108.000.000	32 %
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	91.480.000	140.280.000	48.800.000	53 %
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.836.700.000	1.670.550.000	(166.150.000)	9 %
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	37.200.000	33.000.000	(4.200.000)	11 %
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	157.735.260	139.275.260	(18.460.000)	12 %
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	182.994.963	164.701.763	(18.293.200)	10 %
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.196.698.809	7.329.708.967	133.010.158	2 %
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.142.280.000	1.409.830.000	267.550.000	23 %
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.035.940.172	2.047.706.910	11.766.738	1 %
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	3.000.000	20.580.000	17.580.000	586 %
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	0	39.064.256	39.064.256	100 %
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	725.769.050	662.323.050	(63.446.000)	9 %
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.357.382.500	1.593.247.500	235.865.000	17 %
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	272.500.000	207.500.000	(65.000.000)	24 %
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	35.576.760.900	35.742.376.200	165.615.300	0 %
5.1.02.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.887.300.800	2.887.300.800	0	0 %
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	31.521.509.500	31.521.509.500	0	0 %
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	695.000.000	695.000.000	0	0 %
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	197.550.600	197.550.600	0	0 %
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	275.400.000	441.015.300	165.615.300	60 %
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	3.004.500	0	(3.004.500)	100 %
5.1.02.02.03.0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	3.004.500	0	(3.004.500)	100 %
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.764.900.750	18.664.090.830	(100.809.920)	1 %
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	17.539.075.750	16.987.039.830	(552.035.920)	3 %
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	36.000.000	48.000.000	12.000.000	33 %
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	50.000.000	125.000.000	75.000.000	150 %

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	127.500.000	244.500.000	117.000.000	92 %
5.1.02.02.04.0206	Belanja Sewa Alat Kedokteran Keluarga Berencana	475.000.000	0	(475.000.000)	100 %
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	537.325.000	1.259.551.000	722.226.000	134 %
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.091.250.000	1.540.065.000	448.815.000	41 %
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	289.800.000	366.645.000	76.845.000	27 %
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	22.000.000	0	(22.000.000)	100 %
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	779.450.000	1.143.300.000	363.850.000	47 %
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0	30.120.000	30.120.000	100 %
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0	10.900.000	10.900.000	100 %
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	0	2.100.000	2.100.000	100 %
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	0	8.800.000	8.800.000	100 %
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	300.000.000	330.000.000	30.000.000	10 %
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	300.000.000	330.000.000	30.000.000	10 %
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	230.000.000	800.000.000	570.000.000	248 %
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	200.000.000	700.000.000	500.000.000	250 %
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	30.000.000	100.000.000	70.000.000	233 %
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	50.000.000	65.000.000	15.000.000	30 %
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	50.000.000	50.000.000	0	0 %
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	0	15.000.000	15.000.000	100 %
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.522.620.000	2.105.510.000	(417.110.000)	17 %
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	129.100.000	494.390.000	365.290.000	283 %
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	823.500.000	1.094.500.000	271.000.000	33 %
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.560.020.000	506.620.000	(1.053.400.000)	68 %
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0	343.338.875	343.338.875	100 %
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0	716.625	716.625	100 %
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0	13.650.000	13.650.000	100 %
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0	136.500	136.500	100 %

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0	3.412.500	3.412.500	100 %
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0	80.944.500	80.944.500	100 %
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	0	102.375	102.375	100 %
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	0	238.875	238.875	100 %
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0	23.887.500	23.887.500	100 %
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0	100.000.000	100.000.000	100 %
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	120.250.000	120.250.000	100 %
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0	602.550	602.550	100 %
5.1.02.02.14.0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0	602.550	602.550	100 %
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	37.835.312.208	17.672.763.520	(20.162.548.688)	53 %
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	11.379.306.000	365.388.400	(11.013.917.600)	97 %
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0	93.000.000	93.000.000	100 %
5.1.02.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	0	139.956.000	139.956.000	100 %
5.1.02.03.01.0019	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang	302.451.900	32.432.400	(270.019.500)	89 %
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	11.076.854.100	100.000.000	(10.976.854.100)	99 %
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	804.526.750	1.210.233.750	405.707.000	50 %
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	12.900.000	12.900.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	108.500.000	110.000.000	1.500.000	1 %
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	307.500.000	481.000.000	173.500.000	56 %
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	22.000.000	22.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18.750.000	16.750.000	(2.000.000)	11 %
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	6.250.000	17.750.000	11.500.000	184 %
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	33.428.750	88.268.750	54.840.000	164 %
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	2.208.000	2.208.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.466.000	4.466.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.580.000	2.040.000	460.000	29 %
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0	4.350.000	4.350.000	100 %
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	133.355.000	220.680.000	87.325.000	65 %

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Lainnya (Home Use)	11.800.000	11.800.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0130	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat	0	700.000	700.000	100 %
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0	22.600.000	22.600.000	100 %
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	1.565.000	5.634.000	4.069.000	260 %
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	87.274.000	128.587.000	41.313.000	47 %
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	52.950.000	58.500.000	5.550.000	10 %
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.887.385.401	8.515.834.488	(13.371.550.913)	61 %
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.889.661.167	2.215.993.904	326.332.737	17 %
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	6.906.836.174	1.772.300.400	(5.134.535.774)	74 %
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0	2.914.853.984	2.914.853.984	100 %
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	11.540.349.060	155.500.000	(11.384.849.060)	99 %
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	0	100.071.200	100.071.200	100 %
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	1.136.074.000	1.136.074.000	0	0 %
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	404.418.000	204.418.000	(200.000.000)	49 %
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	10.047.000	16.623.000	6.576.000	65 %
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.618.933.657	7.436.146.482	3.817.212.825	105 %
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.000.049.257	3.555.465.082	2.555.415.825	256 %
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	103.052.400	56.302.400	(46.750.000)	45 %
5.1.02.03.04.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	1.736.850.000	3.007.381.000	1.270.531.000	73 %
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	773.982.000	811.998.000	38.016.000	5 %
5.1.02.03.04.0130	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	5.000.000	5.000.000	0	0 %
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	95.160.400	95.160.400	0	0 %
5.1.02.03.05.0045	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya	95.160.400	95.160.400	0	0 %
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	50.000.000	50.000.000	0	0 %
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	50.000.000	50.000.000	0	0 %
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	36.655.192.972	46.980.283.697	10.325.090.725	28 %
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.455.192.972	46.980.283.697	10.525.090.725	29 %

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.046.539.019	36.490.028.927	9.443.489.908	35 %
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.982.714.953	9.395.536.770	412.821.817	5 %
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	33.930.000	84.695.000	50.765.000	150 %
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	392.009.000	1.010.023.000	618.014.000	158 %
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	200.000.000	0	(200.000.000)	100 %
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa,ÀLuar Negeri	200.000.000	0	(200.000.000)	100 %
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.129.830.000	7.686.080.000	1.556.250.000	25 %
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.129.830.000	7.681.080.000	1.551.250.000	25 %
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	147.100.000	117.800.000	(29.300.000)	20 %
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	163.150.000	143.700.000	(19.450.000)	12 %
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0	1.600.000.000	1.600.000.000	100 %
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	5.819.580.000	5.819.580.000	0	0 %
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	5.000.000	5.000.000	100 %
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0	5.000.000	5.000.000	100 %
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	54.297.090.000	54.297.090.000	0	0 %
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	54.297.090.000	54.297.090.000	0	0 %
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	54.297.090.000	54.297.090.000	0	0 %
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	66.636.243.000	102.495.414.903	35.859.171.903	54 %
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	66.636.243.000	102.495.414.903	35.859.171.903	54 %
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	66.636.243.000	102.495.414.903	35.859.171.903	54 %
5.1.04	Belanja Subsidi	0	1.000.000.000	1.000.000.000	100 %
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	0	1.000.000.000	1.000.000.000	100 %
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	0	1.000.000.000	1.000.000.000	100 %
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	0	1.000.000.000	1.000.000.000	100 %
5.1.05	Belanja Hibah	12.952.396.199	32.356.204.882	19.403.808.683	150 %
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.879.500.000	21.462.007.283	18.582.507.283	645 %
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0	17.600.000.000	17.600.000.000	100 %
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0	17.600.000.000	17.600.000.000	100 %

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.879.500.000	3.862.007.283	982.507.283	34 %
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.879.500.000	3.862.007.283	982.507.283	34 %
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.966.256.295	7.787.557.695	821.301.400	12 %
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.878.600.100	1.861.037.500	(17.562.600)	1 %
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	800.000.000	800.000.000	0	0 %
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.078.600.100	1.061.037.500	(17.562.600)	2 %
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.587.656.195	5.426.520.195	838.864.000	18 %
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.834.999.900	2.350.000.000	515.000.100	28 %
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.752.656.295	3.076.520.195	323.863.900	12 %
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	500.000.000	500.000.000	0	0 %
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	500.000.000	500.000.000	0	0 %
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	1.936.020.000	1.936.020.000	0	0 %
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.936.020.000	1.936.020.000	0	0 %
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.936.020.000	1.936.020.000	0	0 %
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.170.619.904	1.170.619.904	0	0 %
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.170.619.904	1.170.619.904	0	0 %
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.170.619.904	1.170.619.904	0	0 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	438.500.000	428.500.000	(10.000.000)	2 %
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	428.500.000	428.500.000	0	0 %
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	428.500.000	428.500.000	0	0 %
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	428.500.000	428.500.000	0	0 %
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	10.000.000	0	(10.000.000)	100 %
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	10.000.000	0	(10.000.000)	100 %
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	10.000.000	0	(10.000.000)	100 %
5.2	BELANJA MODAL	236.917.577.894	352.861.415.006	115.943.837.112	49 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0 %

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0 %
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	0	0	0	0 %
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	0	0	0	0 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.977.227.908	28.034.550.969	7.057.323.061	34 %
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	12.952.500	135.394.813	122.442.313	945 %
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	12.952.500	135.394.813	122.442.313	945 %
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	8.640.000	8.640.000	0	0 %
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	812.500	13.625.000	12.812.500	1.577 %
5.2.02.01.03.0014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	3.500.000	113.129.813	109.629.813	3.132 %
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.099.741.400	2.195.101.400	1.095.360.000	100 %
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.099.741.400	2.195.101.400	1.095.360.000	100 %
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	550.000.000	1.650.000.000	1.100.000.000	200 %
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	549.741.400	545.101.400	(4.640.000)	1 %
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	1.700.000	1.700.000	100 %
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0	1.700.000	1.700.000	100 %
5.2.02.03.02.0011	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	0	1.700.000	1.700.000	100 %
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	379.839.600	419.839.600	40.000.000	11 %
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	379.839.600	419.839.600	40.000.000	11 %
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	344.839.600	344.839.600	0	0 %
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	35.000.000	75.000.000	40.000.000	114 %
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.593.650.733	6.616.667.243	1.023.016.510	18 %
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	768.584.800	976.375.800	207.791.000	27 %
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	77.300.000	83.550.000	6.250.000	8 %
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	691.284.800	892.825.800	201.541.000	29 %
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.569.915.933	5.318.443.443	748.527.510	16 %
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3.625.752.003	3.860.199.083	234.447.080	6 %
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	13.665.000	18.465.000	4.800.000	35 %
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	472.505.000	801.630.000	329.125.000	70 %

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	18.000.000	22.500.000	4.500.000	25 %
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	434.993.930	608.149.360	173.155.430	40 %
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	5.000.000	7.500.000	2.500.000	50 %
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	255.150.000	321.848.000	66.698.000	26 %
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0	10.800.000	10.800.000	100 %
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	130.000.000	177.450.000	47.450.000	37 %
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	75.400.000	84.048.000	8.648.000	11 %
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	2.500.000	0	(2.500.000)	100 %
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat	47.250.000	49.550.000	2.300.000	5 %
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.211.280.160	805.236.959	(406.043.201)	34 %
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.211.280.160	786.708.300	(424.571.860)	35 %
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	85.263.600	45.681.800	(39.581.800)	46 %
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	503.306.500	213.306.500	(290.000.000)	58 %
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	622.710.060	527.720.000	(94.990.060)	15 %
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0	18.528.659	18.528.659	100 %
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0	17.000.000	17.000.000	100 %
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0	1.528.659	1.528.659	100 %
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.230.658.130	4.854.849.670	624.191.540	15 %
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.224.387.130	2.705.192.280	480.805.150	22 %
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.221.387.130	2.227.192.280	5.805.150	0 %
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	0	475.000.000	475.000.000	100 %
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.000.000	3.000.000	0	0 %
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.006.271.000	2.149.657.390	143.386.390	7 %
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.006.271.000	2.149.657.390	143.386.390	7 %
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	120.000.000	20.000.000	(100.000.000)	83 %
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	100.000.000	0	(100.000.000)	100 %
5.2.02.08.03.0008	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Agama	100.000.000	0	(100.000.000)	100 %
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	20.000.000	20.000.000	0	0 %

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	20.000.000	20.000.000	0	0 %
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.379.448.385	6.327.184.284	1.947.735.899	44 %
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.843.641.000	5.065.541.000	1.221.900.000	32 %
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	2.125.000.000	2.191.250.000	66.250.000	3 %
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.718.641.000	2.874.291.000	1.155.650.000	67 %
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	535.807.385	1.261.643.284	725.835.899	135 %
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	505.807.385	795.643.284	289.835.899	57 %
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	27.000.000	457.000.000	430.000.000	1.593 %
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.000.000	9.000.000	6.000.000	200 %
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0	5.000.000	5.000.000	100 %
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	0	5.000.000	5.000.000	100 %
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	0	5.000.000	5.000.000	100 %
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	2.274.800.000	2.103.600.000	(171.200.000)	8 %
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2.274.800.000	2.103.600.000	(171.200.000)	8 %
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	2.274.800.000	2.103.600.000	(171.200.000)	8 %
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	28.500.000	73.500.000	45.000.000	158 %
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	28.500.000	73.500.000	45.000.000	158 %
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	28.500.000	73.500.000	45.000.000	158 %
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.646.357.000	4.476.477.000	2.830.120.000	172 %
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.646.357.000	4.476.477.000	2.830.120.000	172 %
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.646.357.000	4.476.477.000	2.830.120.000	172 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	101.892.033.127	126.155.664.890	24.263.631.763	24 %
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	78.789.225.619	104.803.191.960	26.013.966.341	33 %
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	78.789.225.619	104.803.191.960	26.013.966.341	33 %
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	6.720.782.942	6.602.962.879	(117.820.063)	2 %
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	12.292.961.988	16.236.564.576	3.943.602.588	32 %
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.144.020.917	1.645.072.589	501.051.672	44 %
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	494.989.888	758.843.308	263.853.420	53 %

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	27.390.202.211	37.460.891.159	10.070.688.948	37 %
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	7.249.000.000	6.512.706.000	(736.294.000)	10 %
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	6.029.198.160	6.941.455.560	912.257.400	15 %
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	2.984.656.524	3.129.591.788	144.935.264	5 %
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	766.270.000	766.270.000	0	0 %
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.500.000.000	2.000.057.400	500.057.400	33 %
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	599.920.000	599.920.000	0	0 %
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	11.617.222.989	22.148.856.701	10.531.633.712	91 %
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	22.194.807.508	20.742.472.930	(1.452.334.578)	7 %
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	22.194.807.508	20.742.472.930	(1.452.334.578)	7 %
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	22.194.807.508	20.742.472.930	(1.452.334.578)	7 %
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	908.000.000	610.000.000	(298.000.000)	33 %
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	908.000.000	610.000.000	(298.000.000)	33 %
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	908.000.000	610.000.000	(298.000.000)	33 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	112.230.140.619	197.120.023.147	84.889.882.528	76 %
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	86.931.752.565	167.405.217.428	80.473.464.863	93 %
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	81.903.051.945	157.763.059.141	75.860.007.196	93 %
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	81.903.051.945	157.763.059.141	75.860.007.196	93 %
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	5.028.700.620	9.642.158.287	4.613.457.667	92 %
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	5.028.700.620	9.642.158.287	4.613.457.667	92 %
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	25.048.388.054	29.704.805.719	4.656.417.665	19 %
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	20.165.011.295	20.979.743.509	814.732.214	4 %
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	14.000.000	14.000.000	0	0 %
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	17.653.953.026	17.021.728.220	(632.224.806)	4 %
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	2.497.058.269	3.944.015.289	1.446.957.020	58 %
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	898.425.039	1.311.561.500	413.136.461	46 %
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	898.425.039	1.311.561.500	413.136.461	46 %
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	620.039.860	1.434.569.570	814.529.710	131 %

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	620.039.860	1.434.569.570	814.529.710	131 %
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3.364.911.860	5.978.931.140	2.614.019.280	78 %
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	3.207.911.860	5.415.331.140	2.207.419.280	69 %
5.2.04.02.07.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	157.000.000	563.600.000	406.600.000	259 %
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	250.000.000	10.000.000	(240.000.000)	96 %
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	250.000.000	10.000.000	(240.000.000)	96 %
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	250.000.000	10.000.000	(240.000.000)	96 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.818.176.240	1.501.176.000	(317.000.240)	17 %
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0	100.000.000	100.000.000	100 %
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0	100.000.000	100.000.000	100 %
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	0	100.000.000	100.000.000	100 %
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.176.240	0	(1.176.240)	100 %
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	1.176.240	0	(1.176.240)	100 %
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	1.176.240	0	(1.176.240)	100 %
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.817.000.000	1.401.176.000	(415.824.000)	23 %
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.817.000.000	1.401.176.000	(415.824.000)	23 %
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	167.000.000	277.000.000	110.000.000	66 %
5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	1.650.000.000	1.124.176.000	(525.824.000)	32 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	50.000.000	50.000.000	100 %
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0	50.000.000	50.000.000	100 %
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0	50.000.000	50.000.000	100 %
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	0	50.000.000	50.000.000	100 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000	4.344.208.652	1.344.208.652	45 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	4.344.208.652	1.344.208.652	45 %
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	4.344.208.652	1.344.208.652	45 %
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	4.344.208.652	1.344.208.652	45 %
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	4.344.208.652	1.344.208.652	45 %
5.4	BELANJA TRANSFER	248.637.284.983	249.936.984.594	1.299.699.611	1 %

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.497.877.983	5.797.577.594	1.299.699.611	29 %
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.333.675.000	4.633.374.611	1.299.699.611	39 %
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.333.675.000	4.633.374.611	1.299.699.611	39 %
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.333.675.000	4.633.374.611	1.299.699.611	39 %
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.164.202.983	1.164.202.983	0	0 %
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.164.202.983	1.164.202.983	0	0 %
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.164.202.983	1.164.202.983	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	244.139.407.000	244.139.407.000	0	0 %
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	244.139.407.000	244.139.407.000	0	0 %
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	244.139.407.000	244.139.407.000	0	0 %
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	244.139.407.000	244.139.407.000	0	0 %
	Jumlah Belanja	1.499.998.049.538	1.668.401.457.508	168.403.407.970	11 %
	Total Surplus/(Defisit)	(27.727.768.143)	(60.206.662.407)	(32.478.894.264)	-117 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	27.727.768.143	60.206.662.407	32.478.894.264	117 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.727.768.143	60.206.662.407	32.478.894.264	117 %
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0	7.545.725.301	7.545.725.301	100 %
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	0	7.545.725.301	7.545.725.301	100 %
6.1.01.02.01.0071	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0	639.458.900	639.458.900	100 %
6.1.01.02.01.0072	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0	390.000.000	390.000.000	100 %
6.1.01.02.01.0073	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0	44.516.240	44.516.240	100 %
6.1.01.02.01.0078	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	0	4.074.083.739	4.074.083.739	100 %
6.1.01.02.01.0082	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	0	2.139.936.802	2.139.936.802	100 %

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.1.01.02.01.0084	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0	1.011.400	1.011.400	100 %
6.1.01.02.01.0101	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0	186.175.820	186.175.820	100 %
6.1.01.02.01.0103	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	46.241.320	46.241.320	100 %
6.1.01.02.01.0104	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	24.301.080	24.301.080	100 %
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	27.727.768.143	29.337.681.668	1.609.913.525	6 %
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	27.727.768.143	29.337.681.668	1.609.913.525	6 %
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	27.727.768.143	29.337.681.668	1.609.913.525	6 %
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0	23.323.255.438	23.323.255.438	100 %
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0	23.151.291.903	23.151.291.903	100 %
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0	23.151.291.903	23.151.291.903	100 %
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	0	39.414.711	39.414.711	100 %
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	0	39.414.711	39.414.711	100 %
6.1.01.08.03	Sisa Dana Kapitasi	0	132.548.824	132.548.824	100 %
6.1.01.08.03.0001	Sisa Dana Kapitasi	0	132.548.824	132.548.824	100 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	27.727.768.143	60.206.662.407	32.478.894.264	117 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0 %
	Pembiayaan Netto	27.727.768.143	60.206.662.407	32.478.894.264	117 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Bupati Luwu


 BASMIN MATTAYANG